



ISLAM DAN KEBANGSAAN

Kelompok 10

ANGGOTA KELOMPOK

- HANA FAKHIRA AZRA (2306233421)
- NAUFAL MAULIANSYAH SALMAN (2306233453)
- IRANA SISILIA MARZALEVA (2306233434)

PEMBAHASAN

- Pandangan Ulama terhadap sistem politik
- Negara bangsa menurut Islam
- Perbedaan negara republik, monarki, system demokrasi dan system syariat Islam
- Piagam Madinah
- Piagam Jakarta
- Pandangan Islam tentang Pancasila

PANDANGAN ULAMA TERHADAP SISTEM POLITIK

Para ulama di Indonesia, seperti yang diwakili oleh NU, Muhammadiyah, MUI, dan ulama ormas Islam lainnya, memandang sistem pemerintahan dengan perspektif fiqhus siyasah atau fikih politik. Mereka mengukur keabsahan suatu negara berdasarkan pada kemampuannya dalam memelihara agama (hirasati al-dini) dan mengelola kepentingan rakyat (siyati al-dunya) sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

NEGARA BANGSA MENURUT ISLAM

Negara-bangsa merupakan realitas sejarah yang tak terhindarkan bagi bangsa mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, setelah runtuhnya khilafah terakhir. Era imperium Muslim digantikan oleh negara-negara kecil, dan kolonialisme Barat menguasai banyak negara Muslim. Pasca-kemerdekaan, negara-negara Muslim membentuk negara mereka sendiri berdasarkan kesatuan kebangsaan. Pandangan Islam terhadap negara bangsa menekankan pentingnya memperhatikan syariat Islam dan nilai-nilai kebaikan Islam dalam berpolitik. Mereka memandang bahwa negara bangsa dapat menjadi bagian dari sistem kepercayaan Islam yang lebih luas, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan Islam dan nilai-nilai kebaikan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

PERBEDAAN NEGARA REPUBLIK, MONARKI, SYSTEM DEMOKRASI DAN SYSTEM SYARIAT ISLAM



Negara Republik

Negara republik adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara biasanya dipilih oleh rakyat atau melalui badan legislatif. Kepala negara adalah presiden yang memiliki peran eksekutif .Republik umumnya memiliki konstitusi yang membatasi kekuasaan pemimpin dan melindungi hak-hak warga negara.

Negara Monarki

Negara monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara adalah seorang raja, ratu, atau pemimpin keluarga kerajaan lainnya. Sistem suksesi monarki biasanya berdasarkan garis keturunan atau keluarga.

Negara Sistem Demokrasi

Negara demokrasi adalah negara dengan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dan pemerintah dipilih melalui proses pemilihan umum yang adil dan bebas.

Negara Sistem Syariat Islam

Sistem syariat Islam adalah bentuk pemerintahan di mana hukum dan peraturan negara didasarkan pada hukum syariah, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, di Madinah. Piagam ini berisi 47 pasal yang mengatur sistem politik, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Piagam Madinah ditujukan untuk mewujudkan perdamaian di Madinah, yang pada saat itu diwarnai oleh peperangan antar suku dan ketidakstabilan sosial. Piagam Madinah juga menekankan kebersamaan, perdamaian, dan keadilan. Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan piagam ini untuk mewujudkan perdamaian di Madinah dan untuk menjamin hak-hak masyarakatnya.

PIAGAM JAKARTA

Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta dibuat oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan memiliki tujuan untuk memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, mempromosikan kebebasan beragama, dan membangun dialog antaragama. Piagam Jakarta juga berfungsi sebagai pernyataan yang melambangkan kebebasan dalam beragama dan pluralisme dalam hukum Indonesia. Dalam sintesis, Piagam Jakarta adalah suatu pernyataan yang melambangkan kebebasan dalam beragama dan pluralisme dalam hukum Indonesia, serta memiliki tujuan untuk memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan membangun dialog antaragama.

PANDANGAN ISLAM TENTANG PANCASILA

Pancasila adalah dasar negara yang rumusannya disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebagaimana tercatat dalam lembaran sejarah, tokoh-tokoh Islam baik dari NU, Muhammadiyah, maupun dari Syarikat Islam berkontribusi besar dalam perumusan dasar dan filsafat negara ini. Bila dilihat dari perspektif sosiologi agama, penerimaan final ummat Islam terhadap Pancasila bisa dilihat sebagai bukti bahwa ummat Islam merasa puas terhadap capaian keagamaan mereka. Pelaksanaan ajaran agama dan Syariat Islam dinilai berlangsung dengan baik di bawah panji ideologi Pancasila. Berbeda dengan sekelompok kecil yang menghendaki formalisme dalam praktek beragama sebagai satu-satunya jalan pengamalan Syariat, ummat Islam Indonesia memilih pendekatan konvergensi formal dan substansial sekaligus dalam beragama.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam dan Kebangsaan dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Pandangan Islam tentang sistem politik dan negara bangsa yang adil, berkeadilan, dan merangkul keberagaman, dapat diimplementasikan dalam berbagai sistem pemerintahan yang ada. Sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umat manusia, maka negara yang berlandaskan pada Islam dan Kebangsaan dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan damai.

**TERIMA
KASIH**

